



Dampak Program Bantuan UMKM Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Dalam Meningkatkan Produksi dan Pendapatan Dimasa Pandemi Covid-19

Marina Paramitha Sari Piola¹, Rusdi Abdul Karim², Rizka Yunika Ramly³

^{1,2,3}Universitas Ichsan Gorontalo/Jl. Ahmad Nadjamuddin No 17 Gorontalo/Indonesia
Email: marinaparamitha@gmail.com¹, rusdiyudhani@yahoo.co.id², ikhayunika@gmail.com³

Citation: Piola, M. P. S., Karim, R. A. & Ramly, R. Y. (2022). Dampak Program Bantuan UMKM Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Dalam Meningkatkan Produksi dan Pendapatan Dimasa Pandemi Covid-19. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 136–145. DOI: [10.32662/gaj.v5i2.1892](https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.1892)

Artikel info

Artikel history:

Received: 13-12-2021

Revised: 30-08-2022

Accepted: 13-09-2022

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the PUMP-P2HP assistance program in Gorontalo Province, especially the impact on increasing POKLAHSAR production and income. This research uses the Approach qualitative with case study method. The results show the implementation of this program through the facilitation of capacity and institutional strengthening by socialization, training, and mentoring. In addition, POKLAHSAR received BLM funding assistance. This research is expected to be a benchmark in implementing assistance programs for MSMEs under the auspices of the Department of Marine Affairs and Fisheries.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari program PUMP-P2HP di Provinsi Gorontalo, terutama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan POKLAHSAR. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa implementasi program ini dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam meningkatkan kapasitas dan penguatan institusi melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Selain itu, POKLAHSAR juga mendapatkan pendanaan melalui skema BLM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam mengimplementasikan program asistensi terhadap UMKM di bawah Dinas Perikanan dan Kelautan.

Keywords:

PUMP-P2HP;

POKLAHSAR;

Production;

Revenue

Corresponden author:

Email: arinaparamitha@gmail.com

Pendahuluan

Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat menuntut upaya pencegahan yang cepat pula. Adanya pembatasan sosial adalah salah satu upaya cepat yang telah diambil oleh seluruh pemerintahan di dunia. Akibatnya, terjadi penurunan

pertumbuhan ekonomi secara mikro-makro pada level nasional yang membawa dampak ke perekonomian global (Suryadinata, 2020). Pelaku UMKM di Indonesia yang dikenal sebagai “penyelamat” dalam krisis moneter 1997, pada kali ini justru terkena dampak yang begitu besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta, mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia (Santia, 2020). Pandemi Covid-19 pada sektor UMKM mengharuskan banyak pelaku usaha menghentikan kegiatan usahanya dikarenakan volume penjualan yang berbanding terbalik dengan beban operasional (Amri, 2020).

Untuk memulihkan perekonomian nasional maka pemerintah berinisiatif untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, secara umum kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional belum terlalu signifikan. Hal ini didukung oleh studi terbaru yang dilakukan oleh Arida (2019) yang menyatakan investasi pada sub sektor perikanan dari tahun 1997-2016 belum dirasakan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Arida, 2019). Hal ini disebabkan oleh program investasi yang masih kurang menyasar sektor sekunder maupun tersier, seperti industri pengolahan produk perikanan. Menurut Tajerin (2015) investasi yang difokuskan pada pembangunan industri pengolahan produk perikanan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional pada level makro (Tajerin et al., 2015). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dampak program PUMP-P2HP dalam memperbaiki perekonomian secara mikro.

Program PUMP-P2HP merupakan program dengan tujuan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasio jumlah penduduk yang terampil dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang inovatif dan produktif serta berdaya saing melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam wadah Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) (Utami, 2018).

POKLAHSAR saat ini telah cukup berkembang dengan ragam produk yang inovatif, pengemasan yang baik dan menarik serta *branding*, dalam praktiknya POKLAHSAR juga mampu mendukung pengarusutamaan gender mengingat keanggotaannya melibatkan wanita (Kominfo Jatim, 2013). Dengan cakupan potensi ekonomi kelautan Indonesia yang mencapai US\$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun menjadikan Indonesia sangat positif dalam sistem perdagangan sekaligus penyedia bahan baku hasil perikanan laut bagi masyarakat nasional dan internasional, maka pemerintah menargetkan peningkatan volume produk olahan ikan yang bermutu dan berdaya saing menjadi 7,04 juta ton dan angka konsumsi ikan 58,08 kg/kapita (Rahma, 2020).

Tujuan Umum Penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program bantuan PUMP-P2HP di Provinsi Gorontalo. Tujuan Khusus Penelitian menganalisis dampak program bantuan PUMP-P2HP terhadap peningkatan produksi dan pendapatan POKLAHSAR di Provinsi Gorontalo. Urgensi penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan program dari segi perencanaan sampai pelaksanaannya dan dampak pemanfaatan bantuan PUMP-P2HP oleh kelompok usaha P2HP. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi acuan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem dan desain program ke depan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada evaluasi pelaksanaan program dari segi perencanaan sampai pelaksanaannya

serta dampak pemanfaatan bantuan PUMP-P2HP oleh kelompok usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan atau (P2HP). Data yang dibutuhkan penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengambilan data primer dilakukan melalui pengamatan terhadap proses pelaksanaan ataupun hasil kegiatan PUMP-P2HP serta melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang telah disusun berdasarkan pedoman teknis PUMP-P2HP terhadap produksi, dan pendapatan POKLAHSAR. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber baik dari lokasi POKLAHSAR dan Dinas Terkait maupun pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo. Narasumber dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok POKLAHSAR di Provinsi Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan dimulai pada bulan Maret sampai Mei 2021. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Penyaluran BLM Program PUMP-P2HP

Sejak Pandemi covid-19 merebak pada tahun 2020. melanda hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan akan krisis kesehatan membawa dampak pada perekonomian di seluruh dunia. Sehingga dampak terberat dirasakan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hal tersebut berbagai kebijakan pun di modifikasi sedemikian rupa agar optimal dalam penanganan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia pun harus memberlakukan kebijakan *social distancing*, *physical distancing*, *work from home* (WFH) dan Pembatasan Sosial yang Berskala Besar (PSBB) berdasarkan peraturan pemerintah RI No.21 tahun 2020 (Kholis et al., 2020).

Adanya Pembatasan aktivitas masyarakat tak ayal memberikan kerugian ekonomi yang signifikan pengaruhnya pada skala nasional pada berbagai sektor (Parhuniarti, 2021). Beberapa penelitian juga menunjukkan sektor UMKM perikanan dalam bidang pengolahan dan pemasar hasil perikanan juga mengalami penurunan pendapatan (Jufra, 2020). Meskipun demikian, kinerja sektor perikanan di masa pandemik menunjukkan capaian yang positif. Berdasarkan Data BPS hingga kuartal I 2020, produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan masih dapat bertumbuh positif di atas PDB nasional dengan kisaran 3,52 %. Dilihat dari aspek Kesehatan, ikan merupakan sumber pangan dengan kandungan protein hewani yang kaya akan nutrisinya sehingga dapat membantu meningkatkan imunitas kekebalan tubuh manusia (Hidayat, 2021). Keuntungan ini menjadikan sektor perikanan sebagai motor penggerak dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah maupun nasional.

Industri pengolahan perikanan merupakan penanganan pasca produksi dengan berbagai jenis komoditas ikan serta penyesuaian selera konsumen. Dengan proses Pengolahan yang dilakukan secara tradisional maupun modern sehingga dapat meningkatkan nilai tambah terhadap produk perikanan tersebut dan penyimpanan pun lebu dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. hal ini yang melatarbelakangi stimulus bantuan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR) untuk dapat menstabilkan Kembali perekonomian usahanya yang didampingi oleh pemerintah (Prasetyo et al., 2020).

Sebagai wujud dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memprioritaskan usaha pengolahan perikanan menjadi bagian penting untuk ditingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan yang berdaya saing. Sehingga, melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan stimulus berupa hibah peralatan pengolahan yang disesuaikan dengan komoditi olahan UMKM POKLAHSAR melalui program yang sebelumnya telah direalisasikan yakni Pengembangan Usaha Mina Pedesaan sub sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan PUMP-P2HP sejak tahun 2012. PUMP-P2HP merupakan kegiatan pemberdayaan yang salah satu programnya adalah memfasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan kepada UMKM POKLAHSAR. Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan POKLAHSAR dan mengembangkan wirausaha bidang pengolahan dan pemasaran perikanan di pedesaan.

Di Provinsi Gorontalo sendiri sejak tahun 2020 program PUMP-P2HP beralih menjadi Program Bedah UMKM yang ditujukan pada UMKM POKLAHSAR. Dengan mekanisme Kelompok penerima lebih sedikit atau penerima dalam satu jenis usaha dengan klasifikasi 70% anggaran pengalokasian pada perehaban unit usaha agar layak sebagai tempat usaha dan 30% pengadaan sarana dan prasarana penunjang usaha dengan menyesuaikan prioritas kesepakatan kelompok dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) sehingga pemanfaatan bantuan digunakan bersama sesuai kebutuhan kelompok. Adanya program ini merupakan respons untuk melindungi, mempertahankan dan membantu memulihkan Kembali kemampuan ekonomi para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya selama pandemik Covid-19.

Pola dasar PUMP-P2HP dirancang untuk meningkatkan kemampuan POKLAHSAR agar dapat mengembangkan usaha produktif dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan pengembangan wirausaha bidang pengolahan dan pemasaran. Dan Program Bedah UMKM sebagai turunan dari program PUMP-P2HP dimaksudkan agar dapat mempertahankan, memulihkan Kembali keberlangsungan usaha POKLAHSAR sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat tercapai. Komponen utama pada kegiatan PUMP-P2HP maupun Bedah UMKM Di Provinsi Gorontalo lihat Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, mekanisme penyaluran bantuan PUMP-P2HP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, kota, provinsi hingga pusat yang meliputi identifikasi, seleksi dan verifikasi data poklahsar maupun persyaratan dokumen administrasi penyaluran PUMP-P2HP. Kelompok pengolah dan pemasar yang terpilih merupakan produsen pengolahan ikan skala kecil dengan modal dan peralatan produksi yang terbatas. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Kusbianindradi selaku Kepala Seksi Pembina Mutu Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo:

“Program bantuan PUMP-P2HP tidak rutin dilakukan, hal ini tergantung dari ketersediaan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Bantuan ini pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo namun pada tahun 2021 kewenangan pelaksanaan program ini berada di tangan Pemerintah Kota/Kabupaten. Tapi, Pemerintah Provinsi memiliki fungsi pengawasan. Dana ini merupakan alokasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, proses pengajuan POKLAHSAR disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Contohnya, kami mendaftarkan 10 POKLAHSAR namun yang lolos seleksi hanya 3 kelompok.”

Berdasarkan Komponen utama kegiatan PUMP-P2HP adalah a.) Keberadaan POKLAHSAR b.) Keberadaan tenaga pendamping, Tim Koordinasi, Pokja PUMP P2HP, Tim Pembina dan Tim Teknis c.) Sosialisasi dan pelatihan d. Penyaluran dana BLM e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk mekanisme tahapan penyaluran yang disampaikan oleh Bapak Kusbianindradi yakni:

Tabel 1. Prosedur Penyaluran Bantuan PUMP-P2HP atau Bedah UMKM Pengolah dan Pemasar Provinsi Gorontalo

Input	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango
Identifikasi, seleksi, verifikasi, penetapan calon penerima bantuan		Beroperasi ±2 tahun Memiliki tempat usaha		
		Seleksi berdasarkan kriteria program bantuan		
Penyiapan dokumen dan verifikasi dokumen	Kelompok yang terpilih diajukan pemberkasan ke pusat			
		Verifikasi penetapan calon penerima bantuan		
Proses		—		
Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dari penyuluh ASN atau penyuluh Pendamping Tenaga Kontrak (PPTK)		Sosialisasi untuk peningkatan kapasitas Pendampingan dilakukan 1-2 kali/bulan oleh DKP		
	—	Sebagian Poklhasar kurang mendapat bimbingan		
Prosedur penyaluran, penarikan dan pemanfaatan dana BLM PUMP-P2HP		Sesuai pedoman pelaksanaan Pemberian bantuan berupa bedah tempat usaha, penyediaan sarana dan prasarana Bantuan diklasifikasikan menjadi 70% bedah unit usaha dan 30% sarana dan prasarana Kelompok penerima berdasarkan jenis usaha Anggaran 100-200 jt/usaha		
Kegiatan pembinaan dan pengendalian sebagai penguatan kapasitas Poklhasar		Terlaksana		
Evaluasi dan pelaporan		Monitoring peningkatan kapasitas produksi dan mutu Laporan dilakukan oleh penyuluh hanya untuk kepentingan pencairan honor penyuluh (kontrak)		
Output		—		
Target jumlah penerima BLM	Kelompok penerima ditentukan oleh pusat	Sebagian Poklhasar dengan umur usaha 5 tahun	Kelompok penerima ditentukan oleh pusat	Sebagian Poklhasar dengan umur usaha 5 tahun
	Jumlah penerima menurun dipengaruhi faktor pandemi	dengan pendapatan rata-rata 2-3 juta belum mendapatkan bantuan	Jumlah penerima menurun dipengaruhi faktor pandemi	dengan pendapatan rata-rata 2-3 juta belum mendapatkan bantuan
Target sasaran penerima program bantuan PUMP		Terdapat Poklhasar (pendapatan 2-3 jt) belum mendapatkan bantuan Usaha perorangan dengan tenaga kerja yang bukan berdasarkan kelompok usaha bersama Serapan anggaran per usaha yang cukup besar sehingga peluang kelompok lainnya kecil		
Ketepatan waktu turunnya dana		Tepat waktu		

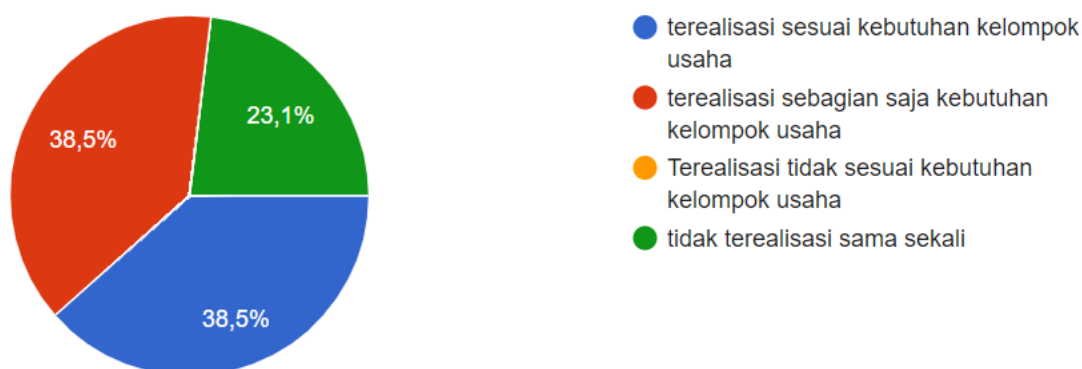
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2021.

“Program PUMP-P2HP yang dilaksanakan oleh provinsi tahun 2020 adalah bedah UMKM. Sebagai prasyarat usahanya telah beroperasi lebih dari 2 tahun dan bentuknya per jenis usaha. Selain itu, mempunyai kepemilikan lahan. Lahannya harus terpisah dari bangunan rumah utama. Jika memenuhi dua kriteria ini maka berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi tempat usaha.”

Selanjutnya, untuk tahap penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan BLM masih menurut Bapak Kusbianindradi.

“Selain bantuan rehabilitasi, pemerintah juga memberikan bantuan berupa pengadaan alat penunjang usaha. Namun yang terpenting adalah saat proses rehabilitasi perlu diperhatikan alur produksinya. Misalnya produk tidak boleh bolak balik dan harus “*fast in fast out*” sehingga mutu produk terjamin. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi memiliki tiga kelompok usaha yang kita bina, yaitu POKLAHSAR ALYA, BILAL MEKAR, dan ANDINI dengan anggaran per usaha sebesar 200 juta. Porsi pemanfaatannya ialah 70% anggaran untuk rehabilitasi dan 30% untuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.”

Peneliti pun melakukan Wawancara Pada POKLAHSAR sebagai penerima manfaat bantuan program PUMP-P2HP atau yang sekarang beralih menjadi Program Bedah UMKM. Berikut pernyataan dari POKLAHSAR terkait penyaluran bantuan BLM untuk UMKM Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR).



Gambar 1. Realisasi Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan UMKM POKLAHSAR bahwa program bantuan PUMP-P2HP yang sekarang beralih menjadi bedah UMKM 38,5% mengatakan terealisasi sesuai dengan permintaan kebutuhan dari POKLAHSAR, dan 38,5% lainnya menyatakan terealisasi Sebagian saja kebutuhannya. Dan Adapun POKLAHSAR dengan tingkat persentase 23,1% menyatakan tidak terealisasi sama sekali. Berikut beberapa pernyataan dari POKLAHSAR.

POKLAHSAR Rahida merupakan Kelompok Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, menjadi salah satu POKLAHSAR penerima bantuan BLM. Adapun bentuk bantuan yang diterima oleh POKLAHSAR Rahida adalah:

“Bantuan yang saya dapatkan berupa rehabilitasi tempat pengolahan dan produksi serta mendapatkan sarana prasarana penunjang usaha. Jadi toko saya direnovasi tahun 2020 dan rampung pada tahun 2021. Jadi, toko ini baru saya tempati. Tata ruang usaha disesuaikan dengan standar mutu yang telah ditentukan. Sekarang ruang produksi terpisah dengan ruang bahan baku, dan juga terdapat ruang etalase produk. Sarana penunjang yang saya dapatkan berupa blender, oven,

meja aluminium, dan berbagai macam peralatan kecil untuk pengolahan. Saya merasa sangat terbantu sekali dengan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.”

Pernyataan lain disampaikan oleh POKLAHSAR Zoellen yang mengatakan bantuan Dinas Kelautan Perikanan hanya Terealisasi Sebagian Saja dari Yang mereka ajukan dalam permintaan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan perikanan.

“Bantuan yang kami dapatkan hanya meja etalase dan mesin spiner, padahal kami juga membutuhkan alat seperti mesin press, dan *cold refrigerator*. Tetapi hingga kini lemari pendingin saja belum kami terima.”

Sejalan dengan pernyataan POKLAHSAR Zoellen, adapun POKLAHSAR yang mengatakan bahwa tidak adanya realisasi bantuan terhadap usahanya. Berikut Pernyataan dari POKLAHSAR Bougenville yang telah menjalankan usahanya di kisaran 5–6 tahun menyatakan.

“Kami sering mendapatkan sosialisasi tapi untuk bantuan kami hanya mendapatkan bantuan berupa plastik kemasan satu pak yang isinya 1.000 lembar. Selain itu belum dapat apa-apa”.

Dalam Hal Pelaksanaan Penyaluran Bantuan PUMP-P2HP atau Bedah UMKM terdapat POKLAHSAR yang masih belum merasakan manfaatnya. Terutama POKLAHSAR skala kecil dengan estimasi modal berkisar 3 juta dan tenaga pekerja paling banyak 2 orang terhitung dengan pemilik usaha yang menggantungkan kehidupannya pada pendapatan dari hasil penjualan walaupun dengan kuantitas yang terbatas. Dalam hal ini sebagai bentuk pemulihan perekonomian, POKLAHSAR sangat membutuhkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan agar bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemik COVID-19.

Keberadaan tenaga pendamping, Tim Koordinasi, Pokja PUMP P2HP, Tim Pembina dan Tim Teknis dan pelaksanaan Sosialisasi dan pelatihan.

“Kami, tenaga pendamping, selaku pembina dan tim teknis hingga penyaluran bantuan. Untuk pendampingan dan pembinaan sering kami lakukan setiap saat melalui saluran *Whatsapp* Group. Namun, tatap mukanya tidak intens karena wilayah kerja kami meliputi satu Provinsi Gorontalo”.

Dari Segi Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bapak Anas Said Selaku Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo, mengatakan bahwa.

“Pemantauan kami lakukan per triwulan atau per semester. Untuk pelaporan dan evaluasinya tidak kami minta ke kelompok penerima bantuan. Jadi, secara garis besar kami tidak meminta pelaporan pertanggungjawaban dari POKLAHSAR. Jadi POKLAHSAR tidak memberikan laporan apa pun kepada kami”.

Sehingga, peneliti pun ingin menggali lebih dalam dengan menanyakan bagaimana segi pemantauan yang dilakukan oleh DKP Kota Gorontalo terkait bantuan serta bagaimana evaluasi atas efektivitas bantuan.

“Setelah bantuan tersalurkan, kami memantau. Kami lihat saja apakah usahanya masih ada atau tidak. Tapi tidak ada laporan yang kami minta ke kelompok.”

Sejalan dengan pernyataan Bapak Anas Said, “dari segi pelaporan untuk teknisnya masih dikerjakan oleh penyuluh tenaga kontrak dengan membuat laporan ke pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh pencairan honor kepada tenaga kontrak jika mereka telah menyelesaikan laporan kinerja mereka. Akan tetapi tim pembina adalah orang dinas yang ditunjuk oleh pusat.”

Dari berbagai pernyataan informan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan PUMP-P2HP telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan yang ada, Program PUMP-P2HP hanya digunakan untuk peralatan pengelolaan dan pemasaran. Jadi bantuan yang diberikan bukan berupa stimulus namun sarana prasarana peralatan sebagai

penunjang usaha. Adapun mekanisme program Bedah UMKM dengan serapan anggaran yang cukup besar untuk satu jenis usaha atau satu kelompok penerima, 70% anggaran akan di fungsikan oleh DKP dalam perehapan unit usaha agar layak sebagai tempat usaha dan 30% pengadaan langsung oleh DKP pada sarana prasarana penunjang usaha dengan menyesuaikan prioritas kesepakatan kelompok dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) sehingganya pemanfaatan bantuan digunakan bersama sesuai kebutuhan kelompok.

Penyaluran Bantuan PUMP-P2HP kepada Poklhasar dibantu oleh kelompok kerja (Pokja) PUMP-P2HP yang sekretariatnya berada pada Direktorat Usaha dan Direktorat Jenderal P2HP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai Tim Pembina, Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai tim teknis serta tenaga pendamping Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) utusan pusat. yang berada di kabupaten /kota penerima PUMP-P2HP.

Namun dari segi evaluasi capaian akan pemanfaatan aggaran yang tergolong cukup besar per kelompok penerima tidak di barengi dengan laporan produksi maupun pendapatan dari poklhasar dikarenakan pembuatan laporan tersebut hanya dilaksanakan oleh penyuluh tenaga kontrak yang pelaporannya langsung ke pusat, sehingganya DKP terkait tidak dapat menilai dan mengevaluasi capaian program ini kepada poklhasar.

Dampak bantuan Program PUMP-P2HP Dimasa Pandemi Covid-19

Kebijakan penanganan pandemi COVID19 dengan mengkarantina wilayah dan pembatasan aktivitas baik di dalam negeri maupun di negara tujuan ekspor berdampak pada penurunan permintaan atas berbagai produk makanan, termasuk produk perikanan. Kondisi ini membuat masyarakat Gorontalo maupun UMKM di provinsi Gorontalo mulai beradaptasi dengan perubahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana teknis daerah, terus memberikan sosialisasi serta pembinaan agar industri pengolah ikan segar hasil panen menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah dan ketahanannya pun lebih panjang Pandemi Covid-19 menggiring perubahan perilaku konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman, dengan memilih makanan yang sehat, higienis, aman bagi tubuh. dan ikan merupakan salah satu opsi bahan makanan dengan kandungan gizi dan protein yang sangat baik sehingga budaya konsumsi makan ikan di masyarakat terus meningkat. Tak lepas akan dukungan dan peran pemerintah dalam menggalakkan program Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN). Upaya tersebut diaungkan guna meningkatkan imunitas masyarakat di tengah pandemi. Terjaganya permintaan konsumsi ikan masyarakat membuat ketersediaan ikan tetap terserap. Lambat laun, sektor kelautan dan perikanan pun menjadi salah satu dari sedikit sektor yang dapat bertahan di tengah krisis kesehatan. Berikut merupakan pernyataan dari POKHLAHSAR Alya memproduksi Sambal Sagela yang merupakan salah satu binaan DKP Provinsi Gorontalo, Ibu Alya menyatakan:

“Awal Pandemi kami UMKM secara memprihatinkan sangat terdampak. Produksi hanya dilakukan jika terdapat pesanan sehingga produksi kami menurun secara signifikan. Akan tetapi, kami bersyukur dari dinas selalu memberikan bantuan untuk kami UMKM. Bantuan yang saya dapat berupa rehabilitasi tempat usaha sehingga berubah menjadi toko yang lebih layak untuk berjualan. Bantuan lainnya berupa pembinaan UMKM untuk menjual secara daring. Berkat berjualan secara daring pemesanan makanan siap saji terutama di masa pembatasan sosial meningkat pesat”. Sejalan dengan pernyataan Ibu Alya, POKHLAHSAR Snack Bilal Mekar yang memproduksi Sagela, Abon Ikan Tuna Rasa Itoni, Panada Tore sependapat dengan manfaat dari program bantuan pemerintah. Selain itu menurut

POKLAHSAR Griya Abon Ikan D'lira memberikan testimoni positif dari pembinaan pemasaran melalui pemanfaatan toko daring.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hasil kebijakan pemerintah dan PUMP-P2HP merupakan salah satu program pemerintah pada sektor industri perikanan berdampak positif dan berhasil secara perlahan dapat memulihkan perekonomian UMKM mikro, kondisi ini membuat POKLAHSAR sebagai pelaku UMKM mulai bisa beradaptasi dan mampu bertahan di tengah pandemi dengan berbagai upaya perubahan dan tetap terus berinovasi.

Kendala Yang dihadapi saat pelaksanaan Penyaluran Program PUMP-P2HP

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Selaku Pelaksana Teknis, adanya Kebijakan penanganan pandemi COVID19 seperti karantina wilayah dan pembatasan aktivitas cukup mempengaruhi aktivitas penyuluh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kusbianindradi sebagai berikut.

“Ada kelebihan dan kekurangannya dengan adanya penerapan *lockdown*. Kegiatan Dinas yang biasanya dilakukan di kantor dipindah tugaskan dengan bekerja dari rumah namun bisa lebih efektif tanpa adanya jarak yang mempengaruhi dengan penggunaan media daring, seperti Zoom Meeting, dalam memberikan sosialisasi maupun pembimbingan”.

Kesimpulan Dan Saran

Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap krisis Kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 lalu hingga tahun ini. krisis ekonomi di seantero penjuru dunia, industri pengolahan ikan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian rakyat, baik pemilik maupun masyarakat yang ikut dipekerjakan. Oleh karena itu, KKP berupaya membangkitkan kembali ekonomi UMKM sektor kelautan dan perikanan di masa pandemi Covid-19 dan kenormalan baru sebagai salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan dan bangkit di tengah pandemik. Strategi Kebijakan Bedah UMKM Pengolahan dan Pengadaan Peralatan Pengolahan bagi industri perikanan merupakan salah satu upaya kebijakan pemerintah yang telah terealisasi sejak tahun 2012 pada Program PUMP-P2H yang ditujukan untuk pelaku usaha dalam pengembangan usaha produktif dalam mendukung peningkatan kemampuan dan pengembangan wirausaha bidang pengolahan dan pemasaran. dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha dalam wadah Kelompok (POKLAHSAR). Output kebijakan pemerintah dari program PUMP-P2HP positif dan berhasil secara perlahan dapat memulihkan perekonomian UMKM mikro pengolah dan pemasar hasil perikanan, kondisi yang sulit sempat menumbangkan sebagian besar UMKM mikro namun perlahan namun pasti UMKM mulai bisa beradaptasi dan mampu bertahan di tengah pandemi dengan berbagai upaya perubahan dan tetap terus berinovasi. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Selaku Pelaksana Teknis, dengan adanya Kebijakan penanganan pandemi COVID19 seperti karantina wilayah dan pembatasan aktivitas cukup mempengaruhi mobilitas namun penyaluran tetap dapat dilaksanakan dengan baik kepada POLAKSAR sebai penerima manfaat.

Melalui kesempatan ini, kami menyarankan beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Pertama, pada aspek pelaporan dan evaluasi perlu di perkuat agar dapat terwujud akuntabilitas yang terstandarisasi. Kedua, program PUMP-P2HP, khususnya di Gorontalo perlu memberikan dukungan terhadap kebutuhan prioritas POKLAHSAR. Ketiga, realisasi program harus dapat menjangkau POKLAHSAR secara berjenjang dan merata. Keempat, perlu meningkatkan sub program/bantuan

teknis yang berfokus terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai PSAK agar dapat membantu dalam evaluasi dan mempermudah terhadap akses modal.

Daftar Pustaka

- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130.
- Arida, A.-. (2019). Pengaruh Investasi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 6(2), 76–81. <https://doi.org/10.33059/jpas.v6i2.882>
- Hidayat, R. (2021, June 28). *Strategi Garap Akuakultur di Masa Pandemi*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/rezihidayat/60d99bb206310e59bc218bb2/strategi-garap-akuakultur-di-masa-pandemi>
- Jufra, A. A. (2020). Studi Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 9(2), 116–131.
- Kholis, M. N., Fratnesi, & Wahidin, L. O. (2020). Prediksi Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang Di Kota Bengkulu . *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 4(1), 1–11.
- Kominfo Jatim. (2013). *Pemerintah Pacu Wirausaha Perikanan*. Kominfo Jatim.
- Parhuniarti. (2021). *Strategi Pengembangan UMKM Sektor Kuliner Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram*. <https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/3309>
- Prasetyo, B., Hubeis, M., & Purwanto, B. (2020). Evaluasi Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten Bogor (Studi Kasus UKM Penerima Bantuan PUMP-P2HP Tahun 2012-2014). *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 15(1), 10–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/mikm.15.1.10-18>
- Rahma, A. (2020, August 21). *Edhy Prabowo: Potensi Ekonomi Kelautan dan Perikanan Indonesia USD 1.338 Miliar*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4335872/edhy-prabowo-potensi-ekonomi-kelautan-dan-perikanan-indonesia-usd-1338-miliar>
- Santia, T. (2020, September 4). *Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya>
- Suryadinata. (2020, June 5). *Virus Corona Hantam Sektor UMKM | Intens*. Intens.News. <https://intens.news/virus-corona-hantam-sektor-umkm/>
- Tajerin, Kurniawan, T., & Wicaksana, M. N. (2015). Dampak Peningkatan Investasi Untuk Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan Indonesia Terhadap Perekonomian Nasional. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 1(2), 89. <https://doi.org/10.15578/marina.v1i2.2075>
- Utami, B. C. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP)*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6sgeb>